

TAREKAT NAQSABANDIYAH DALAM RANAH POLITIK LOKAL

Elen Setiyawati

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study attempt to observe Tarekat Naqsabandiyah generally and focus to the cultural aspect, social, and political of sontang village. Which is explicit and implicit would be analize in every political activities of sontang village. Involvement of tarekat naqsabandiyah in local politic of sontang village emphasize the vision of this movement is not only focus on social religion, but also participate in political dynamics. Influence of tarekat naqsabandiyah's organization become a political thing for the board of sontang village for gain power in village or wider influence, frankly this is out of line as spread principal thought which is ascethic and far from political terrestrial. Tarekat naqsabandiyah formally not yet becoming an official organization by the government, beside that, the existence of tarekat naqsabandiyah in sontang village still intense so that bring out the argument that the use of tarekat is only for benefit of one or more political party, not in order paper to tightly the base member of tarekat or wider thetheory.

Abstrak: Studi ini mencoba untuk melihat Tarekat Naqsyabandiyah secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek kultural, sosial dan politik desa Sontang. Yang kemudian akan dianalisis secara eksplisit dan emplisit dalam aktifitas-aktifitas politik desa Sontang sendiri. Keterlibatan tarekat Naqsyabandiyah dalam politik lokal desa Sontang mempertegas arah gerakan ini yang tidak hanya fokus pada gerakan sosial keagamaan saja, melainkan turut serta dalam dinamika politik yang terjadi. Pengaruh kuat organisasi tarekat Naqsyabandiyah nyatanya dijadikan alat politik oleh elit desa Sontang untuk meraih kekuasaan baik pada level desa maupun pengaruh secara luas, hal itu nyatanya tidak sejalan dengan prinsip penyebaran ajaran tarekat yang asketik dan jauh dari unsur politik duniawian. Tarekat naqsyabandiyah secara formal memang belum menjadi organisasi yang diakui oleh pemerintah, namun terlepas dari situasi itu eksistensi gerakan tarekat Naqsyabandiyah di desa Sontang masih kuat sehingga memunculkan argumentasi bahwa pemanfaatan tarekat itu hanya untuk kepentingan satu atau lebih kelompok elit politik saja, bukan pada agenda untuk memperkuat basis jama'ah tarekat maupun memperluas ajaran.

Kata Kunci: politik dan agama, relasi politik, tarekat naqsyabandiyah

PENDAHULUAN

Terlepas dari rangkaian sejarah penyebaran ajaran Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Sontang, pengaruh ajaran tarekat yang kuat dalam kondisi sosio kultural masyarakat memang menjadikan organisasi tarekat sebagai basis politik yang potensial dan ideologis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian gerakan tarekat banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebagai gerakan dengan kekuatan sosial yang sangat diperhitungkan, tarekat memang pada perjalanannya banyak mempengaruhi arah kebijakan daerah, baik dalam konteks politik maupun kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah.

Perkembangan tarekat di Desa Sontang beberapa terakhir mengalami pergeseran. Keberadaan tarekat dijadikan sebagai instrumen politik untuk mempengaruhi kekuasaan. Pergeseran-pergeseran syari'at tarekat itu bisa dilihat

dari kecenderungan orang-orangnya banyak terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan banyak jabatan-jabatan di pemerintahan desa diduduki oleh orang-orang/jamaah tarekat.

Berikut peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pergeseran arah gerakan tarekat dari gerakan sosial keagamaan ke arah sosial politik di Desa Sontang.

1. *Impeachment* Kekuasaan Kepala Desa Sontang Tahun 1990-2011
2. Aksi Penuntutan Pergantian Camat Bonai Darussalam Tahun 2011
3. Peristiwa Politik Pemilihan Kepala Desa Sontang Tahun 2012
4. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Mengacu pada itu semua, studi ini mencoba untuk melihat bagaimana Tarekat Naqsyabandiyah dalam ranah politik Desa Sontang. Lalu

apa faktor-faktor yang mempengaruhi serta apa implikasinya terhadap eksistensi tarekat itu sendiri. Namun secara umum studi ini juga ingin melihat tarekat secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek kultural, sosial dan politik desa.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Kemudian penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok tarekat. Untuk itu, dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan diteliti adalah antara tahun 2009-2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Tarekat Naqsyabandiyah dalam Gerakan Politik

Tarekat Naqsyabandiyah telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan agama dan kehidupan sosial masyarakat Desa Sontang. Atas kepemimpinan para mursyid terdahulu untuk mengembangkan, memodifikasi, dan mengaktualisasi ajaran-ajaran tarekat, kegiatan tarekat dapat meningkatkan kesadaran agama dengan penuh spiritualitas dan perbaikan moralitas masyarakat pada waktu itu. Dengan begitu, kiprah tarekat menjadi penyeimbang kehidupan bathiniyah terhadap kebutuhan-kebutuhan lahiriah masyarakat.

Demikian pula pengaruh tokoh kharismatik mursyid terdahulu di kalangan masyarakat desa sampai sekarang dinilai masih tampak kokoh,

dengan tingkat eksistensi yang berbeda-beda sesuai dengan ketenaran kharisma mereka masing-masing. Para pemimpin kharismatik tersebut tidak hanya memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah ibadah khusus, namun juga masih memperlihatkan perannya dalam ikut memecahkan dan menyelesaikan persoalan sosial maupun ekonomi.

Namun pada kenyataannya, semakin kini pengaruh tarekat tidak lagi murni untuk kepentingan bathiniyah semata. Melainkan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan politik elit tertentu. Seperti yang terjadi di Desa Sontang, yang mana tarekat seringkali dijadikan alat politisasi untuk kepentingan elit tertentu. Tidak heran jika kesakralan tarekat itu sendiri sudah mulai menghilang, lebih tepatnya pada saat ini tarekat dinilai hanya lebih menekankan simbol-simbol. Seperti aktifitas bersuluk yang rutin dilaksanakan, namun setelah selesai kegiatan bersuluk tidak mendapatkan pemahaman sebagai implementasi dari bersuluk tersebut.

Untuk melihat bagaimana keterlibatan Naqsyabandiyah dalam politik masyarakat desa Sontang, berikut diklasifikasi dalam gerakan politik desa Sontang.

Impeachment Kekuasaan Kepala Desa Periode 1990-2012

Pemunculan isu dan pembentukan opini publik

Peristiwa *impeachment* kepemimpinan Arisman Son, PH pada masa pemerintahannya merupakan bagian dari rangkaian proses politisasi elit-elit tarekat Naqsyabandiyah dalam merebut kekuasaan Kepala Desa tersebut. Adapun upaya-upaya *impeachment* yang dilakukan yaitu salah satunya dengan memunculkan isu-isu sehingga membentuk opini publik. Seperti isu kepemimpinan yang otoriter dan korup, kemudian isu pola kemitraan yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Bonai yang diketuai oleh Arisman Son, PH sendiri yang dinilai tidak transparan. Tidak hanya itu, upaya lain yang dilakukan untuk menjatuhkan kepemimpinan Arisman Son PH adalah dengan membentuk Pemerintah Desa tandingan. Akibatnya terjadinya kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya masyarakat yang melakukan aksi menuntut pergantian kepemimpinan Kepala Desa membuat keadaan semakin kacau.

Merujuk pada isu publik yang dibangun, Zulfahrianto yang merupakan anak kandung dari tuan guru tarekat tampil sebagai Sekdes dalam Pemerintahan desa tandingan yang diciptakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, aparat-aparat dalam pemerintahan desa tandingan juga dijabat oleh sebagian dari jama'ah tarekat Naqsyabandiyah yang merupakan murid-murid dari pada tuan guru tarekat itu sendiri. Dengan tampilnya Zulfahrianto dalam upaya pelengseran kepemimpinan kepala desa tersebut tidak dipungkiri bahwa keterlibatannya merupakan ada kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Ini tentu mempunyai potensi politik dengan memanfaatkan tarekat Naqsyabandiyah sebagai alat politik.

Pembentukan kelompok kepentingan dan elit

Demi mendapatkan legalitas dalam upaya pelengseran kepemimpinan Kepala Desa Sontang, maka elit-elit tarekat Naqsyabandiyah mencari sekutu untuk menjatuhkan Arisman Son, PH dari jabatannya. Sehingga dibentuklah forum sebagai bagian dari kerjasama antara kelompok kepentingan dan elit tarekat Naqsyabandiyah untuk membahas strategi pelengseran. Adapun sekutu yang diajak bergabung yakni kubu Murkhas dari kelompok kepentingan, sedangkan untuk elit tarekatnya sendiri yakni kubu Zulfahrianto. Setelah terbentuknya forum, maka kesepakatan yang dihasilkan yaitu Menginginkan dibagikan lahan pola kemitraan kepada masyarakat, menuntut diturunkannya kepala desa dan digantikannya seluruh aparat desa, menuntut dibubarkannya pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Bonai dan digantikan dengan pengurus yang baru, menuntut digantikannya Datuk Bendaro selaku ketua Lembaga Adat Desa dan digantikan oleh Murkhas, dan menuntut diadakannya pemilihan kepala desa secara demokratis.

Mediasi kelompok pro-kontra

Mengacu pada permasalahan yang terjadi akibat tuntutan masyarakat yang menghendaki Arisman Son, PH untuk diganti sebagai Kepala Desa Sontang, namun dalam perspektif lain Pemerintah Desa tetap bertahan untuk tidak dilakukannya pergantian kepemimpinan Kepala Desa sehingga menyebabkan terbentuknya

dualisme Pemerintahan Desa. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu akhirnya mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Tanggal 27 Juli 2011 forum mediasi dilakukan di Kantor Bupati Rokan Hulu yang dipimpin atau ditengahi oleh Asisten I bupati Rokan Hulu Drs. Jamaludin dan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan yaitu Sofwan, S.Sos. Pada forum mediasi ini dihadiri oleh pihak Camat Bonai Darussalam Herdiyanto, A.S.STp, pemerintah desa dihadiri oleh kepala desa (Arisman Son PH), sekretaris desa defenitif (Tarzan Jas), Sudirman HS sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sontang. Kemudian untuk masyarakat diwakili oleh Murkhas selaku anggota DPRD Rokan Hulu Dapil wilayah Sontang, Dodi selaku tokoh masyarakat yang masih kubu Murkhas, Nursal, Sapri, Hapison.

Adapun hasil kesepakatan dari mediasi tersebut yang diperoleh dari Asisten I Bupati Rokan Hulu yaitu :

1. Memberhentikan Arisman Son PH sebagai Kepala Desa Sontang dan diberlakukan Perpanjangan Jabatan Sementara (PJS) selama enam (6) bulan, dengan syarat selama diberlakukan Perpanjangan Jabatan Sementara (PJS) kepala desa harus aktif menyelenggarakan pemerintahan desa;
2. Pemerintah desa mempersiapkan kepanitiaan untuk pemilihan kepala desa secara demokratis atau secara langsung oleh masyarakat;
3. Pemilihan kepala desa disepakati pada tanggal 21 Februari tahun 2012
4. Tarzan Jas sebagai sekretaris desa Sontang yang sah dan dinyatakan berhenti setelah pensiun;
5. Untuk aparat pemerintah desa lainnya tetap diakui aparat desa defenitif sampai masa jabatannya berakhir;
6. Untuk pola kemitraan diserahkan kepada pihak pemerintah desa yang kemudian untuk dibagikan kepada masyarakat.

Setelah disepakati poin-poin diatas, maka Melalui hasil mediasi yang disepakati secara resmi pada pertengahan bulan Juli tahun 2011

Arisman Son PH menyatakan pengunduran dirinya dengan mengajukan usulan pengunduran diri kepada Pemerintah Daerah.

Perlawanan Masyarakat dalam Penetapan Camat

Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bonai Darussalam pada tahun 2010 terhadap aksi penuntutan masyarakat Bonai untuk pergantian Camat Bonai Darussalam, yakni Roy Roberto, S.IP selaku camat Bonai Darussalam yang penunjukannya ditetapkan oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, Msi juga merupakan bagian dari politisasi elit-elit tarekat Naqsyabandiyah untuk mendapatkan posisi Camat tersebut. Aksi ini tergabung kedalam perlawanan masyarakat Bonai, dikarenakan masa aksi terdiri dari 7 (tujuh) desa. Dimana dalam aksi tersebut warga menuntut Roy Roberto, S.IP untuk mundur dari jabatannya dan digantikan dengan Taslim sebagai putra daerah Sontang atau Bonai.

Upaya penuntutan pergantian camat merupakan kepentingan politik dari elit tarekat yang mana Taslim yang diminta sebagai pengganti Camat merupakan murid tuan guru tarekat itu sendiri. Dan ini sudah direstui oleh Zulfahrianto selaku anak kandung dari tuan guru, yang mana restu tersebut merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh tuan guru.

Pemilihan Kepala Desa Sontang periode 2012-2018

Pemanfaatan tarekat oleh elit maupun kyai (tuanku) tarekat sendiri untuk berbagai kepentingan terutama kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Desa Sontang menjadi tidak terelakkan. Salah satu calon kandidat Kepala Desa Sontang Zulfahrianto dinilai memiliki masa yang kuat, karena statusnya sebagai anak Tuan Guru Tarekat. Jika dilihat dari perspektif jumlah jam'ah tarekat yang dimiliki sudah memungkinkan untuk Zulfahrianto merebut suara terbanyak. Apalagi jika masing-masing jama'ah memiliki keluarga, sehingga memungkinkan untuk dipengaruhi untuk memilih Zulfahrianto pada saat pemilihan dimulai.

Dari perspektif lain adanya pola hubungan guru murid yang membentuk sosial dalam komunitas tarekat. Para guru tarekat memegang pera-

nan utama dalam menentukan tingkat kemampuan spiritual murid sehingga apabila seorang murid dipandang telah memiliki kemampuan tertentu, dia bisa sampai menduduki posisi khalifah (pengganti atau wakil) untuk menyampaikan metode-metode gurunya. Keadaan inilah yang memberikan peluang Zulfahrianto, karena otoritas tuan guru merupakan salah satu sumber politik yang dimiliki.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011

Kedekatan interpersonal antara guru tarekat dengan Achmad

Bagi guru tarekat di Sontang, faktor kedekatan interpersonal dengan calon yang didukung merupakan salah satu syarat penting karena kedekatan interpersonal yang baik akan menjamin adanya komunikasi yang baik antara dirinya dan aktor politik. Guru tarekat Naqsyabandiyah di Sontang berpendapat kedekatan tersebut perlu terus dijaga agar kelompok tarekat yang dipimpinnya tidak hanya sekedar menjadi basis dukungan bagi aktor politik untuk mewujudkan agenda politiknya. Adapun kedekatan tuan guru dengan Achmad sebagai salah satu calon kandidat Bupati Rokan Hulu terlihat dari beberapa kali agenda Drs. Achmad, Msi tersebut ketika melakukan kunjungan selalu berkomunikasi dengan Kh. Abdurrahim selaku tuan guru tarekat. Komunikasi yang terbangun merupakan bagian dari restu tuan guru dalam dukungan untuk Achmad sebagai calon Bupati Rokan Hulu.

Penilaian guru tarekat atas performa Achmad

Faktor berikutnya adalah penilaian atas performa calon yang akan didukung dalam mendukung dakwah tarekat Naqsyabandiyah di Sontang. Adanya kecenderungan soliditas sikap politik pengikut tarekat Naqsyabandiyah di Rokan Hulu untuk mengambil pilihan politik sesuai dengan arahan politik gurunya pada pemilukada kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 adalah bentuk kepatuhan. Kepatuhan tersebut merupakan manifestasi dari adanya pola hubungan patron-klien dan adanya sistem nilai dan ajaran yang berlaku dalam kelompok tarekat Naqsyabandiyah di Rokan Hulu. Kedua faktor tersebut yang menjadi penyebab adanya kepa-

tuhan yang terpelihara dilakukan oleh pengikut tarekat kepada guru tarekatnya.

Potensi basis pengikut dan loyalitasnya terhadap pemimpinnya membuat kelompok tarekat mempunyai posisi tawar yang baik dalam sistem politik di Rokan Hulu juga Desa Sontang. Hal tersebut didukung dengan adanya pandangan Syekh sebagai pimpinan kelompok tarekat Naqsyabandiyah di Sontang yang melihat hubungan antara agama dan politik sebagai 2 hal yang dapat diarahkan untuk saling mendukung. Pandangan guru tarekat tersebut menjadi penting dalam menentukan sikap kelompok tarekat yang dipimpinnya dalam sistem politik. Keputusan tersebut berangkat dari pertimbangan kedekatan interpersonal antara Tuan Guru Abdurrahim dan penilaian atas performa Achmad dalam mendukung pengembangan dakwah tarekat Naqsyabandiyah di Rokan Hulu.

Afiliasi Politik Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah

Partisipasi politik jamaah tarekat naqsyabandiyah dalam partai politik di tingkat lokal desa Sontang dapat diidentifikasi kepada dua bentuk, yaitu: partisipasi politik secara langsung dan partisipasi politik secara tidak langsung. Bentuk partisipasi politik secara langsung jamaah tarekat dalam partai politik adalah: keikutsertaan atau keterlibatan jamaah tarekat secara resmi, atau langsung terjun dalam kehidupan politik praktis dengan menjadi bagian dalam struktur kepengurusan partai politik (pengurus partai politik).

Partisipasi politik secara tidak langsung tuan guru/ jamaah tarekat naqsyabandiyah dalam partai politik adalah: keterlibatan tuan guru/ jamaah tarekat dalam politik dengan tidak bergabung ke dalam partai politik secara resmi, tidak memegang jabatan dalam partai, atau sama sekali tidak berafiliasi dengan partai apapun. Dengan kata lain, mereka hanya menjadi pendukung partai politik dari luar struktur partai. Pada bentuk partisipasi politik jenis ini, walaupun tuan guru/ jamaah tarekat tidak berada dalam struktur kepengurusan partai politik, namun mereka berperan serta dalam berbagai agenda politik di tingkat lokal seperti pada pemilihan umum (pemilu), dan sebagainya.

Implikasi Keterlibatan Tarekat Naqsyabandiyah dalam Ranah Politik

Tarekat Naqsyabandiyah di desa Sontang tidak diragukan lagi memiliki peran signifikan dalam turut membentuk preferensi politik seseorang dan atau masyarakat. Namun berbeda dengan atribut sosial lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang relatif mudah diukur, kesalehan beragama (*religiosity*) sebagai dasar tindakan politik berimplikasi terhadap eksistensi tarekat Naqsyabandiyah desa Sontang. Adapun implikasi yang terjadi yaitu pada pergeseran nilai-nilai surau, dan kewibawaan tuan guru.

Surau berfungsi sebagai aktifitas keagamaan, ibadah, sebagai wadah dialog jamaah tarekat Naqsyabandiyah terkait isu-isu sosial, keagamaan serta sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat desa Sontang. Namun dengan adanya penggunaan tarekat Naqsyabandiyah oleh elit tarekat menyebabkan pergeseran nilai-nilai surau yang seyogyanya harus dimanfaatkan untuk kepentingan sesuai dengan fungsi surau tersebut. Adapun pergeseran nilai-nilai surau bisa dilihat dari penggunaan surau sebagai penyebaran isu-isu politik dan surau sebagai upaya doktrin politik untuk jamaah tarekat. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa tarekat Naqsyabandiyah sebagai lumbung suara.

Selanjutnya kewibawaan tuan guru yang pada awalnya sangat kharismatik justru dengan politisasi tarekat oleh tuan guru sendiri menyebabkan menurunnya kewibawaan tuan guru. Tuan guru hanya dipandang sebagai simbol namun pada ajaran-ajarannya tetap dilaksanakan oleh murid-murid tarekat sesuai adab. Yang berbeda pada kharomahnya tuan guru, dimana kharomah tuan guru yang tidak bisa dipandang kecil namun yang terjadi kharomah tuan guru tidak memiliki makna.

Dampak keterlibatan tarekat dalam aktivitas politik Desa Sontang menimbulkan reaksi dari kalangan tarekat itu sendiri. Reaksi yang muncul dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu reaksi yang mendukung terhadap keterlibatan itu dan reaksi yang menolak terhadap keterlibatan tarekat dalam ranah politik itu. Reaksi yang mendukung lebih didasarkan pada pemikiran pada aktivitas jamaah tarekat sehingga tidak menjeneralisir bahwa tarekat berpolitik melainkan

jamaahnya saja. Persepsi yang berkembang adalah bahwa jamaah tarekat harus turut serta dalam pentas politik baik di level Desa Sontang maupun di kancan yang lebih luas. Oleh karena itu, beberapa jamaah kemudian berinisiatif menjadi bagian dari partai politik dan tim sukses Calon Kepala Daerah maupun Calon Kepala Desa Sontang.

Sedangkan reaksi kelompok yang menolak keterlibatan Tarekat dalam ranah politik desa Sontang ini memiliki anggapan selama ini terhadap ulama dan kelompok tarekat yang sering diasosiasikan sebagai kelompok yang lebih memfokuskan diri untuk menekuni dunia spiritual dan tidak bersinggungan dengan dunia politik yang dianggap identik dengan “kotor” adalah kurang bisa diterima.

SIMPULAN

Penggunaan tarekat Naqsyabandiyah dalam ranah politik lokal desa Sontang bisa dilihat dalam hal-hal sebagai berikut : a) *Impeachment* kekuasaan Kepala Desa Sontang sebagai upaya bagian dari proses politik elit tarekat Naqsyabandiyah untuk menduduki kekuasaan Kepala Desa Sontang. b) perlawanan masyarakat desa Sontang terhadap penetapan Camat Bonai Darussalam Roy Roberto sebagai upaya *impeachment* kekuasaan camat bonai yang bertujuan untuk menempatkan elit-elit tarekat untuk posisi Camat tersebut. c) dari serangkaian peristiwa politik pada poin a dan b, maka *goals* nya yaitu pemilihan Kepala Desa Sontang, dimana dalam pemilihan tersebut, menempatkan Zulfahrianto sebagai salah satu calon kandidat merupakan bagian politisasi tarekat Naqsyabandiyah dalam aktivitas politik lokal desa Sontang. d) kemudian mobilisasi massa dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009 untuk memenangkan calon kandidat Drs. Achmad, Msi. Upaya kemenangan dilakukan dengan memanfaatkan adab tarekat kepada jama'ah agar tunduk dan patuh dengan instruksi tuan guru. Tidak hanya itu, juga adanya interaksi antar tuan guru desa Sontang dengan beberapa tuan guru tarekat di wilayah kecamatan Bonai Darussalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Bustanuddin. 2009. *Agama dan Fenomena Sosial*. Bogor: Kencana
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press
- Brunessen, Martin Van. 1994. *Tarekat Naqsyandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Fatono, Ahmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya
- Mulyati, Sri. 2006. *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Nasution, Harun. 2008. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press
- Nawari, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Rais, M Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gemma Insani
- Ratawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujuti, Mahmud. 2001. *Politik Tarekat*. Yogyakarta: Galang Press
- Soetrisno, Loekman. 2003. *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: Tajidu Press
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press
- Zubir, Ziyarda. 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press